

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA  
MASA PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dadin Eka Saputra<sup>1</sup>, Dedi Sugiyanto<sup>2</sup>,  
Mahasiswa Fakultas Hukum Unlam  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
E-mail :

**ABSTRAK**

*Kata Kunci : Surat Edaran, Covid-19, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai penegakan hukum bagi masyarakat yang dianggap tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah.

Rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kedudukan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) ditinjau dari Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data.

Surat Edaran bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi. Kajian yuridis terhadap Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) ditinjau dari Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan adalah Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keputusan tersebut merupakan amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan dan penetapan pintu masuk dan/ atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan dengan terlebih

- Indonesia, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ateng Syafrudin, (2015). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan.
- Asmaeny Aziz Izlindawati, (2018). *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta : Kencana
- Bagir Manan, Kunta magnar, (2017). *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung : Armico.
- Indroharto, (2013). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan.
- Indrati, Maria Farida, (2017). *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi, Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- I Gede Panjtja, Suprin Na<sup>o</sup>a, (2018). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, (2015). *Hukum Acara Pegujian Undang-Undang*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kamal Hidjaz, (2012). *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi.
- Nurmayani, (2019). *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Ridwan HR, (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo Ekatjahjana, (2018). *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

#### Jurnal Ilmiah

- Icha Satriani, (2015). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Josua Elie Tampubolon (2018). *Implementasi Kebijakan Surat Edaran Walikota tentang kedisiplinan PNS dilingkungan pemerintah kota Bandar Lampung*” Skripsi Bandar Lampung.
- Wiwit Sugiarti, (2017). *Analisis surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian*. Skripsi : Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Perintah

### **Internet**

<http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/ilmuperundang-undangan>.

Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 , Pukul 08.14 WIB

Sudikno Mertokusumo,(2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, (2011)/. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Subekti, (2014). *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.

UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020.